

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kondisi Kota Makassar merupakan kota metropolitan tetapi memiliki banyak pengembangan obyek wisata nasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun *stakeholder* di setiap kawasan yang ada di Kota Makassar. Potensi daya tarik alam yang dimiliki oleh Kota Makassar berupa pantai yang terletak di pesisir kota merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi Kota Makassar dengan melihat beberapa proses baik untuk obyek wisatanya maupun lokasi yang menjadi produk untuk melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki.

Pantai Akkarena memiliki daya tarik wisata alam yang khas dan berbeda dengan wisata berbasis bahari lainnya yang berada di Kota Makassar. Dilihat dari pesona pemandangan senja di sore hari, dilengkapi dengan kesejukan pepohonan yang mengelilingi kawasan wisata pantai menambah suasana alam yang hijau memanjakan wisatawan yang sedang berkunjung ke Pantai Akkarena. Namun, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pengelola Pantai Akkarena harus memperhatikan bagaimana cara atau strategi yang tepat untuk melakukan pengembangan dalam melihat dan meneliti sejauh mana perkembangan wisata Pantai Akkarena setiap tahunnya sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menambah atau membatasi strategi yang menguntungkan bagi perkembangan wisata Pantai Akkarena sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola dalam pengembangan pesona Pantai Akkarena untuk meningkatkan kunjungan wisatawan agar tetap bisa mempertahankan keberadaan eksistensi wisata Pantai Akkarena. Berikut merupakan beberapa saran antara lain :

1. Menciptakan suatu kerjasama dalam pengembangan obyek wisata untuk suatu sinergitas yang solid antar pemerintah, *Stakeholders* Pariwisata dan masyarakat.
2. Perlu adanya suatu dana yang jelas dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan maupun pengembangan pariwisata guna untuk membangun obyek wisata, dengan melihat berbagai keperluan yang dibutuhkan.
3. Masyarakat sebagai partisipasi yang mendukung perencanaan dan pengembangan pariwisata turut serta bersama-sama pemerintah maupun *stekesholder* untuk membangun obyek wisata sehingga tidak ada perselisihan atau pertentangan status kepemilikan dengan masyarakat lain maupun pihak terkait.
4. Perlu adanya suatu promosi yang difokuskan pada wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di negara-negara lain untuk dikenal, baik melalui media cetak, elektronik maupun lewat pengelaran seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berbaur tentang pariwisata.